

ABSTRAK

Pemilu serentak tahun 2019 merupakan Pemilu pertama di Indonesia yang menggabungkan pelaksanaan Pileg dengan Pilpres. Tujuan dari adanya Pemilu serentak tahun 2019 diantaranya adalah agar tercipta efektifitas dan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Penelitian ini terkait dengan (1) bagaimana proses penyelenggaraan Pemilu serentak di Indonesia?, (2) bagaimana Problematika pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia? dan (3) bagaimana efektifitas Pemilu serentak dalam mewujudkan penguatan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan alat pengumpul data dan analisis data dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negara hukum, teori sistem hukum dan teori negara demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pemilu serentak yang dilaksanakan pada 17 April 2019 diikuti oleh 20 partai politik dan diikuti oleh dua pasangan calon presiden yakni 1. Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin dan 2. H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin memperoleh 84.646.196 suara. pasangan Nomor urut 2 . H. Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. memperoleh 68.357.813 suara. Problematika yang muncul pada saat pelaksanaan pemilu serentak yaitu (1) adanya konflik kepentingan individu maupun kelompok; (2) anggaran yang tidak efisien atau boros; (3) *money politic*; (4) politisasi terhadap birokrasi; dan (5) banyak petugas penyelenggara pemilu yang gugur. Hasil Pemilu serentak tahun 2019 dapat dikatakan mampu menguatkan sistem pemerintahan presidensial.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Sistem Pemerintahan Presidensial

ABSTRACT

The simultaneous general election in 2019 is the first general election in Indonesia that combines the implementation of the legislative and presidential elections. The purpose of holding simultaneous elections in 2019 is to create effectiveness and strengthen the presidential government system. This research is related to (1) how is the process of holding simultaneous elections in Indonesia? (2) how is the problem of simultaneous elections in Indonesia? and (3) how is the effectiveness of simultaneous elections in realizing the strengthening of the presidential government system in Indonesia?

The research method used in this research is the empirical juridical approach; research specification is analytical descriptive, the type and source of data are primary and secondary legal materials. Data collection techniques using data collection tools and data analysis using qualitative methods. Theories used in this research are the theory of the rule of law, the theory of the legal system and the theory of the democratic state.

The results showed that the simultaneous election process which held on April 17, 2019, was followed by 20 political parties and was followed by two pairs of presidential candidates, namely 1. Ir. H. Joko Widodo and Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin and 2. H. Prabowo Subianto and Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. KPU establishes candidate Pair number 1. Ir. H. Joko Widodo and Prof. Dr. (HC). KH. Ma'ruf Amin received 84,646,196 votes. Pair number 2. H. Prabowo Subianto and Sandiaga Salahuddin Uno, MBA. got 68,357,813 votes. The problems that arise during the simultaneous election are (1) the existence of conflicts of interest, both individuals and groups; (2) inefficient or wasteful budget; (3) money politics; (4) politicization of the bureaucracy; and (5) many election administrators have died. The results of the simultaneous elections in 2019 can be said to be able to strengthen the presidential government system.

Keywords: The simultaneous elections, Presidential Government System